

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan melalui evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan OPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2019 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh optimalisasi potensi unggulan daerah.

### A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam penyusunannya harus memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Skenario pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan agrobisnis dan agroindustri di bidang kegiatan pertanian pada umumnya di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah memerlukan peningkatan pelayanan jasa dan potensi jaringan kerja lintas wilayah yang selama ini belum secara optimal dimanfaatkan.

Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 juga harus memperhatikan tujuan dan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Perda tersebut mengamanatkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan perkembangan wilayah Kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman dan produktif. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen tersebut, disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

1. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis dan potensi lokal lainnya di Kabupaten;
2. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggeraksektor agrobisnis dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa;
3. pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis dan potensi lainnya di Kabupaten;
4. pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan kegiatan pendukung lainnya;
5. pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
6. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka panjang;
7. pengembangan kawasan strategis untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang; dan
8. mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana.

Untuk menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah, maka perlu disusun suatu kebijakan serta strategi pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal. Maka berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

1. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
  - a. rencana Kawasan Strategis Kota Kebumen dan Kota Gombong;
  - b. rencana Kawasan Strategis Kota Prembun dan Kota Petanahan;
  - c. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karanganyar dan Perkotaan Sruweng; dan
  - d. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karangasambung dan Perkotaan Kutowinangun.
2. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
  - a. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan pengembangan Kawasan Benteng Van Der Wijck; dan
  - b. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan pengembangan Kawasan Masjid Soko Tunggal.
3. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
  - a. masterplan fisik dan pengelolaan kawasan pesisir;

- b. pengembangan dan penghijauan kawasan hutan bakau di kawasan pesisir;
  - c. rehabilitasi kawasan hutan lindung Kawasan Sempor dengan penanaman tanaman lindung yang dapat mengikat tanah dan menyerap air dengan baik;
  - d. pengembangan dan penghijauan kawasan lindung Kawasan Sempor;
  - e. penataan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsembung;
  - f. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Sub Daerah Aliran Sungai Serayu-Bogowonto;
  - g. pemulihan kerusakan lingkungan kawasan bentang alam karst; dan
  - h. penyusunan rencana zonasi kawasan bentang alam karst.
4. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi
- a. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan waduk dan bendung Sempor; dan
  - b. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan Bendung Wadaslintang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 merupakan bagian perencanaan tahapan lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2015 Tahap III dan IV dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya penguatan daya saing dan pertumbuhan perekonomian melalui pengembangan ekonomi wilayah agar masyarakat dan wilayah dapat berproduksi dengan bertumpu pada pengembangan potensi wilayah dan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 yaitu

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul,  
Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan

- dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
  5. Berdaya : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
  6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
  7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
<b>MISI I</b>		
Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		2. Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan
		3. Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga
		4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

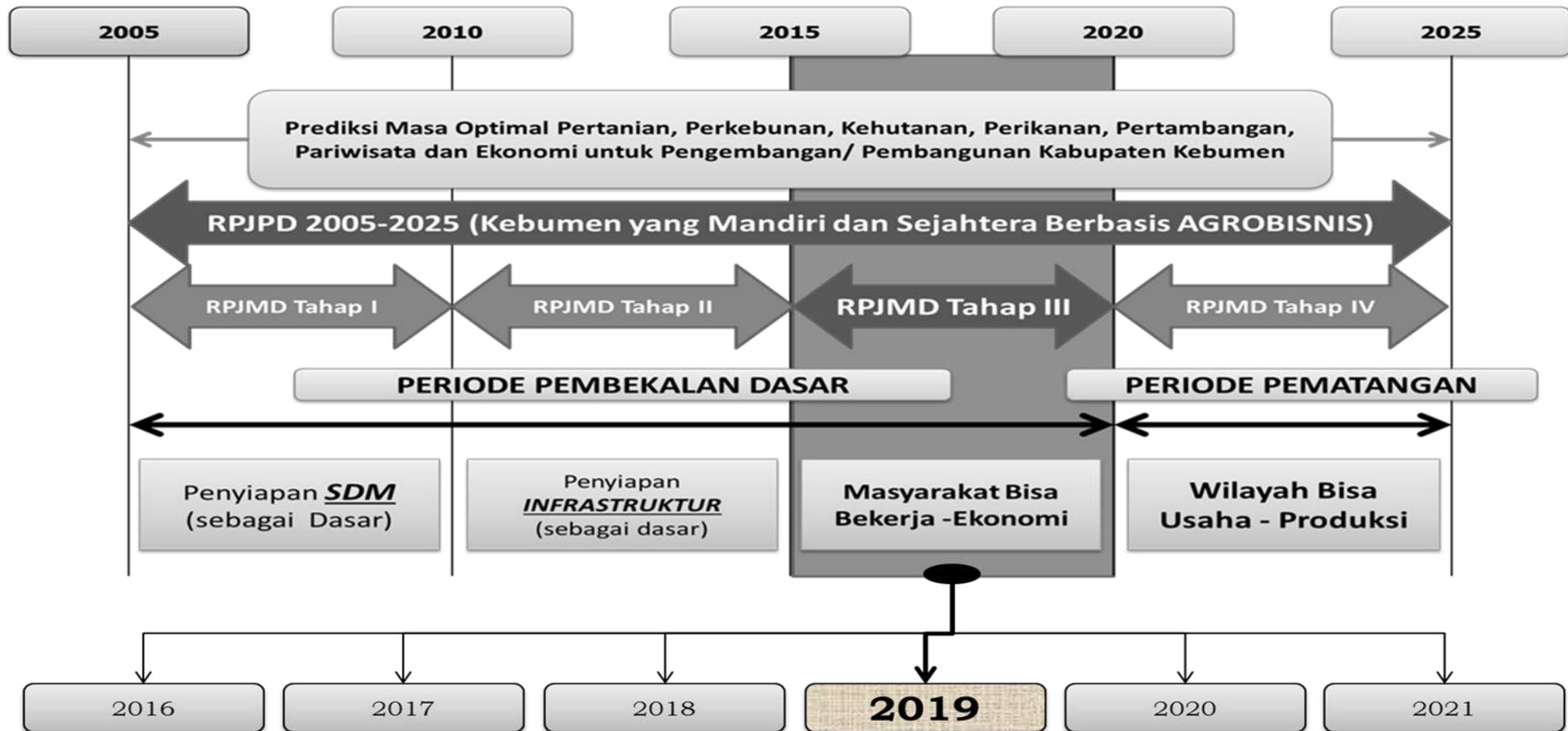
MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI II		
Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat	2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	5. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia
	3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	6. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum
MISI III		
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	7. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
	5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	8. Meningkatnya daya saing investasi daerah
	6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	9. Meningkatnya kunjungan wisatawan
	7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	10. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah
MISI IV		
	Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri,	8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera

MISI	TUJUAN	SASARAN
perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	13. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
MISI V		
Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	14. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan
MISI VI		
Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal ( <i>Good and Clean Government</i> ) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketata-laksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
		17. Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

#### B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 ini merupakan pelaksanaan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 juga merupakan jawaban atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Adapun gambaran posisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.1  
Posisi Pembangunan Tahun 2019  
dalam Skenario Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 didapatkan dengan mendasari kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Dalam bab VII RPJMD Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detail dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, antara lain :

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, berlandaskan pada pengamalan dan penghayatan nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta ditopang dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik;
2. membangun perekonomian daerah berbasis kepada ekonomi kerakyatan, optimalisasi pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah dengan fokus pada agrobisnis (pertanian, perkebunan dan peternakan), pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing, ditopang dengan penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
3. mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin melalui penciptaan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa, agama dan budaya; dan
4. meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui profesionalisme, peningkatan tatakelola dan perluasan partisipasi publik melalui kebijakan penyelenggaraan *good governance* yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain kebijakan umum pembangunan daerah, ditetapkan juga beberapa kebijakan teknis pembangunan yang disusun dengan melihat urgensi dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Kebijakan umum percepatan penanggulangan kemiskinan

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, antara lain:

- a. Penyusunan Satu Data Kemiskinan Kabupaten Kebumen melalui kegiatan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap data kemiskinan, dengan indikator yang mengkombinasikan indikator kemiskinan Nasional dan indikator kearifan lokal. Pendataan dan verifikasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dikoordinasikan oleh Bappeda dan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bersama Perangkat Daerah terkait;
- b. Menyusun model penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis kawasan pada daerah-daerah/wilayah-wilayah

tertentu yang menjadi kantong kemiskinan dan memiliki karakteristik seperti:

- 1) kawasan pertanian dan perkebunan (model pengembangan desa-desa miskin di kawasan utara seperti Kecamatan Karanggayam, Karangsambung, Sadang dan Alian);
  - 2) kawasan pariwisata (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Ayah);
  - 3) kawasan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit); dan
  - 4) kawasan industri kecil (model pengembangan desa-desa di wilayah tengah Kabupaten Kebumen).
- c. Menjadikan program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu Gerakan Daerah dan Gerakan Bersama yang dibangun dengan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai pilar-pilar utama pembangunan serta dilaksanakan melalui fondasi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.
- d. Penyusunan Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen beserta *roadmap* dan Rencana Aksinya.
- e. Optimalisasi dan dinamisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui:
- 1) rapat koordinasi yang terjadwal (minimal dilakukan setiap triwulan);
  - 2) menggunakan sistim Ban Berjalan, melalui instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi; dan
  - 3) penyediaan anggaran yang memadai.
2. Kebijakan umum pengembangan agrobisnis
- Secara spasial, berdasarkan kawasan strategis, peruntukan dan potensi wilayah, pengembangan agrobisnis di Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan, diarahkan antara lain pada wilayah:
- a. Kawasan EMAS (Eko-Mina-Agro-wiSata), dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Ayah, Puring, Buayan, Kuwarasan, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, dan Ambal. Sektor-sektor yang dikembangkan di daerah ini antara lain pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta pariwisata;
  - b. Kawasan Agrowisata Tanaman Buah-Buahan, di wilayah Kecamatan Karangsambung dan Sadang; dan
  - c. Kawasan penunjang, yang terdiri atas:
    - 1) kawasan pusat-pusat jasa di wilayah Kecamatan Kebumen, Karanganyar, Gombong, Prembun dan Kutowinangun;
    - 2) kawasan industri di wilayah Kecamatan Petanahan dan Klirong; dan

- 3) pengembangan infrastruktur penunjang di antaranya jalan selatan-selatan di wilayah pesisir (Mirit-Ayah), jalan lintas utara di wilayah (Rowokele-Padureso) dan pembangunan embung-embung mini di kawasan pertanian (Karangsambung, Sadang, Karanggayam dan Ayah).

### 3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam bahasa Inggris. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti.

Indonesia berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2016–2030 melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017. SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup dan menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan yang memerlukan sinergi kebijakan antara Pusat dan Daerah. Prinsip TPB/SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan; serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal ini diperlukan tindak lanjut penyusunan dokumen terkait kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian TPB-SDGs di tingkat nasional dan daerah.

Tabel 4.2  
Target SDGs Dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

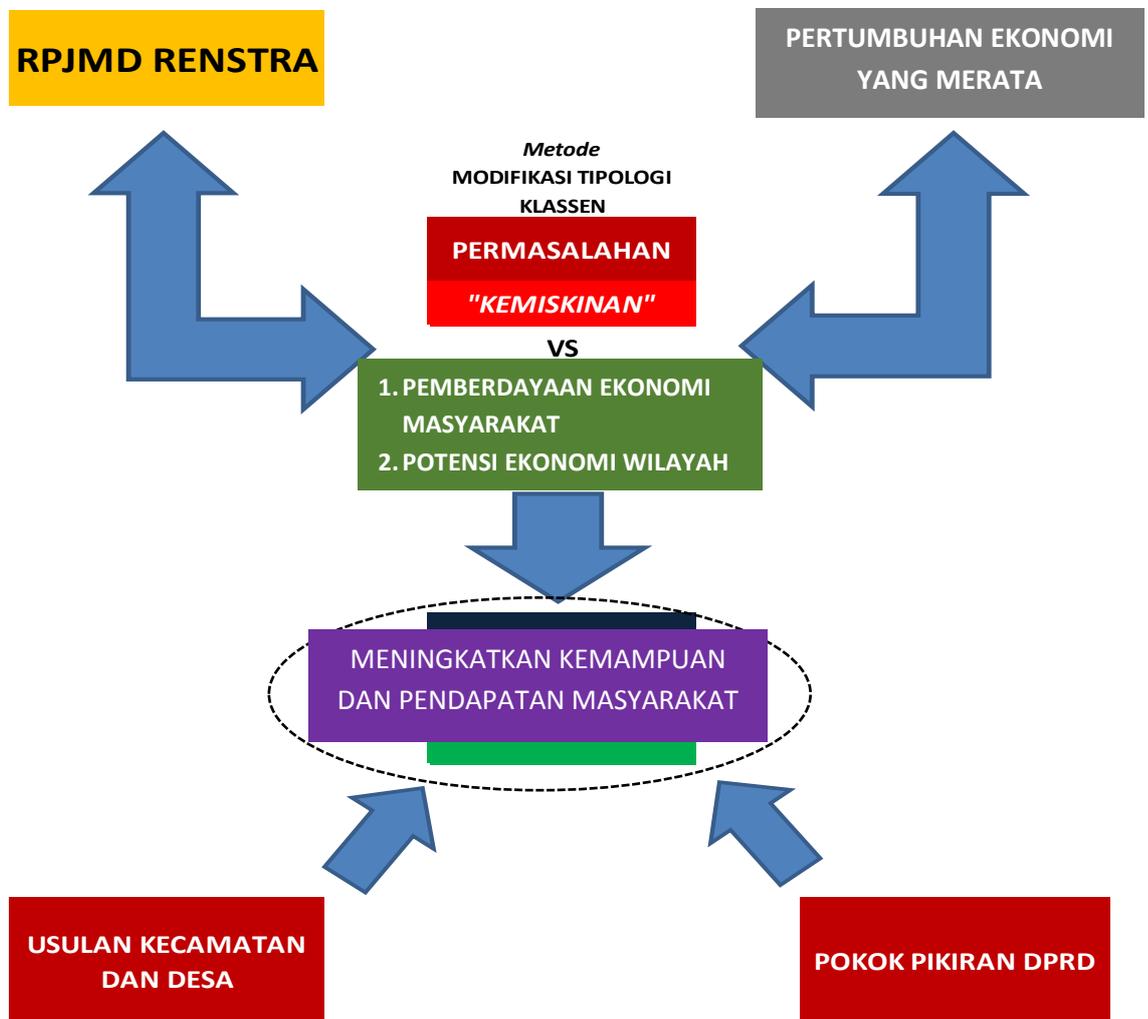
No.	Tujuan SDGs (2030)	Indikator Kinerja	Capaian Sampai Dengan Tahun 2017	Target Tahun 2019
1.	Mengentaskan kemiskinan ekstrim untuk seluruh masyarakat di dunia	Angka Kemiskinan (%)	19,6	16,98
2.	Menggandakan produktivitas pertanian	Produktivitas padi (ton/ha)	5,56	5,6
		Produktivitas jagung (ton/ha)	6,10	6,2
		Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,08	1,1
3.	Mengurangi rasio kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran	Angka Kematian Ibu	61,38	85
4.	Mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita	Angka Kematian Bayi	7,21	10,90
5.	Menjamin akses universal terhadap layanan layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana	Jumlah akseptor KB	154.502	154.502
6.	Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis, setara dan berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	12,61	12,87
		Rata-Rata Lama Sekolah	7,05	7,11
7.	Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	80,39	81,41
8.	Meraih akses yang adil dan universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua	Persentase penduduk berakses air minum	87,16	89,0
9.	Meraih akses yang adil dan cukup terhadap sanitasi dan kebersihan untuk semua	Persentase penanganan sampah	45,97	47,5
10.	Memajukan kebijakan yang berorientasi pada	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,87	5,94

No.	Tujuan SDGs (2030)	Indikator Kinerja	Capaian Sampai Dengan Tahun 2017	Target Tahun 2019
	pembangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan	Pendapatan perkapita penduduk (ADHK) (Rp)	20.370.000	22.447.540
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,85	2,01
		Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	2	4
		Jumlah industri kecil menengah	56.398	56.398
11.	Merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung budaya dan produk lokal	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA)	Ada	Ada
12.	Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	55,77	59,43
13.	Menjamin peluang yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan menghilangkan peraturan, kebijakan, dan praktik yang mendiskriminasi serta mendorong adanya legislasi, kebijakan dan tindakan yang sesuai terkait hal tersebut	Indeks Gini	0,23	0,21
14.	Menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan kondisi permukiman kumuh	Cakupan Rumah Layak Huni	94,57	100
		Luas Permukiman Kumuh (Ha)	196,09	160,39
15.	Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan	Indeks Kualitas Lingkungan	68,67	74,75

No.	Tujuan SDGs (2030)	Indikator Kinerja	Capaian Sampai Dengan Tahun 2017	Target Tahun 2019
	penggunaan kembali sampah (3R)			
16.	Mendorong proses pengadaan barang dan jasa publik yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional	Penerapan e-Proc	Sudah	Sudah
17.	Meningkatkan daya tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	17,14	31,43
18.	Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan di mana pun, secara signifikan	Penurunan kasus pelanggaran hukum	750	650

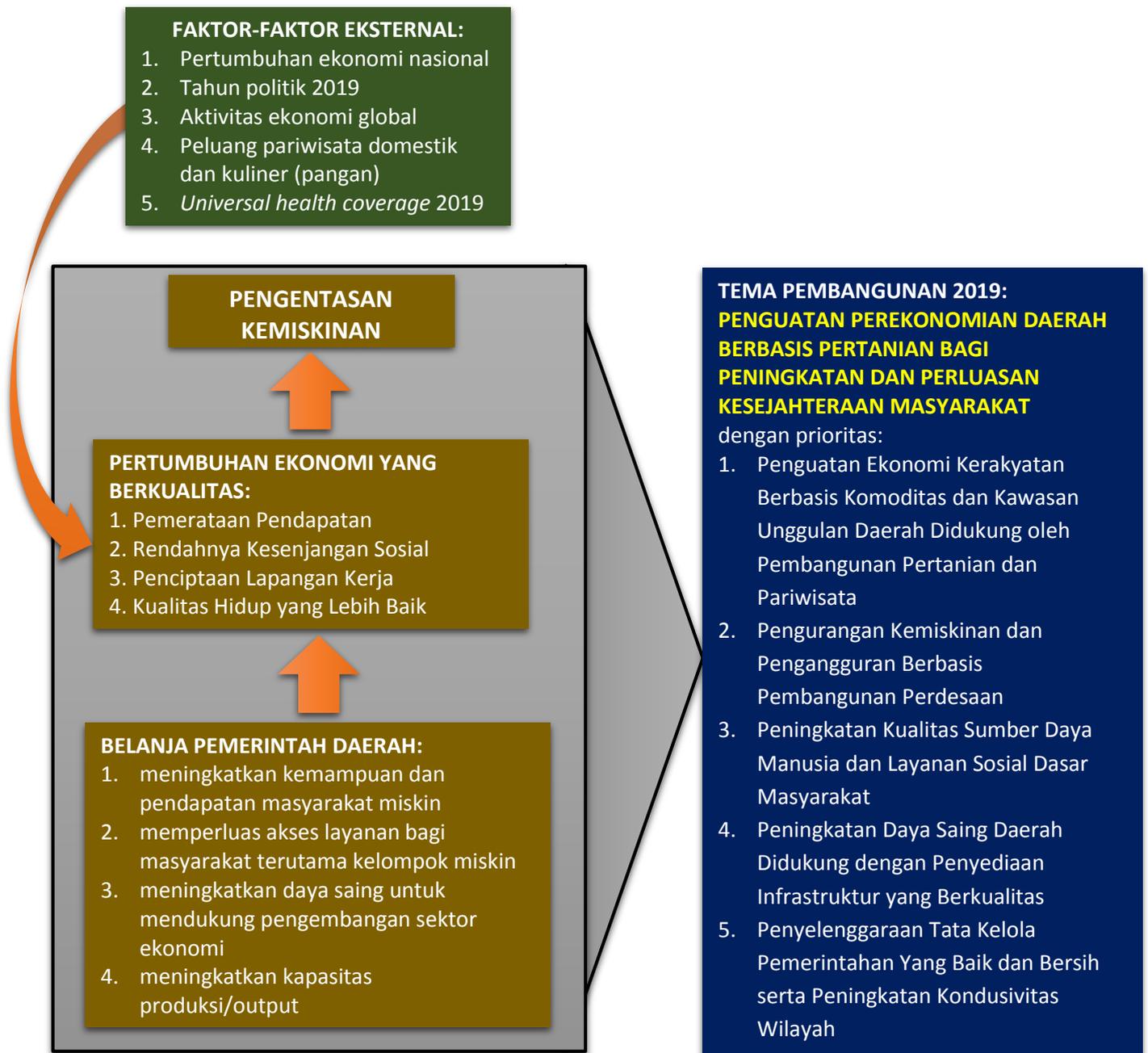
Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

4. Pengembangan Kawasan Geopark Karangsembung-Karangbolong  
Rencana tata ruang wilayah kabupaten Kebumen mengamanatkan perlindungan terhadap Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsembung dan Kawasan Bentang Alam *Karst* dengan mempertahankan struktur batuan serta ekosistem di atasnya. Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan *geopark* nasional dengan visi memuliakan warisan bumi untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengembangan Geopark Karangsembung-Karangbolong harus mengintegrasikan aspek perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan dengan konsep manajemen pembangunan kawasan secara berkelanjutan yang memadukan-serasikan tiga keragaman alam yaitu *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*.



Gambar 4.2  
Kerangka Pikir Penentuan Strategi  
Pembangunan Daerah Tahun 2019

Sumber : Bap3da, 2018



Gambar 4.3  
Kerangka Pikir Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Faktor Eksternal, Target, dan Tujuan Akhir Pembangunan Daerah Tahun 2019

Sumber : Bap3da, 2018

Kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi landasan penentuan strategi pembangunan daerah Tahun 2019 yaitu peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi unggulan setiap wilayah (kecamatan). Hal ini dalam upaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di antaranya dengan pencapaian pendapatan perkapita yang tinggi, indeks gini yang rendah (rendahnya kesenjangan masyarakat), angka pengangguran yang rendah hingga angka kemiskinan yang rendah.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum belanja pemerintah daerah dalam RKPD Tahun 2019 akan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga akan lebih mampu secara ekonomi dan memiliki tingkat daya beli yang baik serta memperluas akses masyarakat miskin, meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi serta meningkatkan kapasitas produksi/output, dan juga untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Arahkan belanja pemerintah daerah ini sebagai upaya untuk mencapai target-target pembangunan daerah yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang akan menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat dan rendahnya kesenjangan sosial, penciptaan lapangan kerja, kualitas hidup yang lebih baik hingga mampu mengentaskan kemiskinan yang menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah. Selain itu, arahan belanja pemerintah daerah juga telah memperhatikan faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi aktivitas perekonomian daerah yang secara lengkap telah diuraikan pada Bab III.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2019 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2019. Secara lengkap sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 tersaji pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2  
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019

PRIORITAS KABUPATEN KEBUMEN	SELARAS DENGAN PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH	SELARAS DENGAN PRIORITAS NASIONAL
1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Didukung oleh Pembangunan Pertanian dan Pariwisata	2. Daya Saing Ekonomi Daerah 4. Kedaulatan Pangan dan Energi 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
2. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	1. Kemiskinan	1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	3. Kualitas Daya Saing dan Sumber Daya Manusia	1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
4. Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	2. Daya Saing Ekonomi 5. Kesenjangan Wilayah	2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

PRIORITAS KABUPATEN KEBUMEN	SELARAS DENGAN PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH	SELARAS DENGAN PRIORITAS NASIONAL
5. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	7. Tata Kelola Pemerintahan	5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Adapun target utama pembangunan daerah pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3  
Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2019
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,21	12,87
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,93	7,11
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	53,30	59,55
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	38,78	56,04
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,77	72,93
		6. Angka Kematian Ibu	Angka	68,48	85
		7. Angka Kematian Bayi	Angka	10,50	10,90
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	23,66	32,61
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	Kasus	867	650

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2019
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi	%	5,83	5,94
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Ribu Rp	16.983,67	22.447,54
		13. Rasio/Indeks Gini	Point	0,24	0,22
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Unit	-	4
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	0	6
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	16,73	17,90
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	49,09	59,43
7. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air, sumberdaya lahan, sumber daya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point/ Indeks	59,92	74,75
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	20,02	16,98
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	2,09	2,01
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	76,64	81,41
	Meningkatnya kualitas sarana dan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan	%	90,00	95,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2019
	prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	kesehatan			
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B	B
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	CC	B
		25. Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WTP
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	30,00	70,00

Sumber : RPJMD Tahun 2016-2021

Dengan mendasarkan pada poin-poin di atas dan mendasarkan hasil evaluasi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai tahun 2021 serta permasalahan yang ada, maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2019 adalah “Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian Guna Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2019 antara lain:

1. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung oleh pembangunan pertanian dan pariwisata;
2. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Peningkatan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas; dan
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kondusivitas wilayah.

Tabel 4.4  
 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan  
 Kabupaten Kebumen Tahun 2019

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Prioritas 1 : Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas Dan Kawasan Unggulan Daerah Didukung Oleh Pembangunan Pertanian Dan Pariwisata Prioritas ini mendukung Misi 3 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat		
1.	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
2.	Mengembangkan kawasan perdesaan	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
3.	Mengembangkan Kawasan Industri	
4.	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	
5.	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota
6.	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
7.	Peningkatan operasi pasar	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
8.	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri
9.	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
10.	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah	
11.	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah
12.	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
13.	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/masyarakat
14.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
15.	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi	
17.	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana-prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah
18.	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa	

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
19.	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
20.	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
21.	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
22.	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
23.	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
<p>Prioritas 2 : Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan</p>		
<p>Prioritas ini mendukung Misi 4 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu</p>		
<p>Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan</p>		
1.	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2.	Meningkatkan keterampilan masyarakat	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai
3.	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat	kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
<p>Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat</p>		
<p>Prioritas ini mendukung Misi 1 dan 5 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu</p>		
<p>Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas</p>		
<p>Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat</p>		
<p>Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat</p>		
1.	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal
2.	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	Perluasan akses pendidikan formal
3.	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
5.	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
6.	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit	
7.	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan	
8.	Meningkatkan perilaku hidup sehat	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
9.	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar	Meningkatkan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar
10.	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar	Meningkatkan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
11.	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai ajaran agama
12.	Meningkatkan pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama
13.	Meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	Optimalisasi produk hokum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/kejadian di Kabupaten Kebumen
14.	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	Peningkatan kualitas sarana dan prasaran pendidikan
15.	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan	
16.	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan bPKD, puskesmas dan rumah sakit	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan
<p>Prioritas 4 : Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung Dengan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas</p> <p>Prioritas ini mendukung Misi 2 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu</p> <p>Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat</p>		
1.	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
2.	Mengembangkan kawasan perdesaan	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
3.	Mengembangkan Kawasan Industri	
4.	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota
5.	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi	
6.	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
7.	Peningkatan operasi pasar	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
8.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri
9.	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
10.	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah	
11.	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah
12.	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
13.	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/masyarakat
14.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
15.	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi	
17.	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah
18.	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa	
19.	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
20.	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
21.	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
22.	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
23.	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
<p>Prioritas 5: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah</p> <p>Prioritas ini mendukung Misi 6 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu</p> <p>Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.</p>		
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik ( <i>Good and Clean Governance</i> )
2.	Meningkatkan prosedur pelaporan sisten keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	Peningkatan akuntabilitas sistem pelapor-an keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan
3.	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber: BAP3DA (data diolah)